

DAMPAK COVID 19 TERHADAP KESEJAHTERAAN HIDUP BURUH DAN PETANI

by Asmah Jurnal Tor

Submission date: 15-Jun-2020 09:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 1344266218

File name: TOR_APPTHI_1.docx (31.07K)

Word count: 3119

Character count: 19836

DAMPAK COVID 19 TERHADAP KESEJAHTERAAN HIDUP BURUH DAN PETANI

ASMAH

UNIVERSITAS SAWERIGADING MAKASSAR

Jln Kande 1 No. 27

Email:asmahunsa@yahoo.co.id

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial di muka bumi bersosialisasi dan bekerja merupakan sebuah tuntutan dasar dalam memenuhi kehidupannya dan kehidupan keluarganya, berbagai kebutuhan manusia tergantung dari keinginan dan kebutuhan masing-masing setiap individu dalam memenuhi tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang dilakukan selama ini. Ada manusia yang melakukan pekerjaan untuk menaikkan kesejahteraannya untuk dilihat orang, sedangkan sebagian lagi bekerja untuk bertahan hidup, berbagai aktivitas tersebut tentunya harus didukung oleh fasilitas dan kemampuan yang memadai dari seorang pekerja dan negara harus mampu mewujudkan suatu aturan yang dapat memberikan kesejahteraan.

Suatu negara yang mempunyai dasar sebagai negara hukum dan demokrasi dan atau Rule of law harus menjalankan suatu pemerintahan harus memperhatikan unsur ketertiban dalam pengelolaannya, bahkan terkadang ada unsur paksaan yang berpotensi untuk melanggar Hak asasi manusia jika aturan yang dikeluarkan itu tidak dapat di kelola dengan baik.

Esensi ¹¹ Rule Of law mempunyai dasar berupa, negara memiliki hukum yang adil, berlakunya prinsip distribusi kekuasaan, semua orang, termasuk penguasa negara harus tunduk kepada hukum, semua orang mendapat perlakuan yang sama depan hukum, perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat ¹

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tujuan dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya terutama dalam mewujudkan penghidupan dan pekerjaan yang layak, hal ini tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 "ayat" 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

¹ Munir fuadi, teori negara hukum moderen, reflika utama, Bandung 2011

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. "ayat" 2 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.²

Cita-cita negara yang tertuang dalam UUD 1945 tersebut, belum sepenuhnya tercapai dengan baik, berbagai hal yang menjadi hambatan selama ini, belum bisa dipecahkan oleh pemerintah maupun oleh legislatif sebagai pengawas pemerintah, kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terutama untuk kalangan buruh dan petani.

⁶ Setiap warga negara Indonesia (WNI), sesuai dengan bakat, kecakapan, dan keterampilan masing-masing, berhak atas pekerjaan yang layak, setiap orang berhak dengan bebas untuk memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat perburuhan yang adil. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, ras dan agama atau etnis.³

Dengan adanya hari buruh dan hari tani yang diperingati setiap tahunnya tidak terlalu berdampak kesejahteraan bagi mereka dalam mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak, selama ini mereka di manfaatkan oleh beberapa kalangan hanya untuk kepentingan partai atau golongan tertentu

Buruh dan petani merupakan dua kelompok masyarakat yang ada di Indonesia, mempunyai peranan sentral dalam kehidupan, dimana buruh dalam melaksanakan pekerjaannya selain sebagai pencari nafkah buat keluarga, juga sebagai membantu pengusaha atau pemilik modal dalam mempercepat pekerjaannya dan produksi untuk di nimati masyarakat, sedangkan petani adalah sebuah pekerjaan mulia yang bekerja bukan hanya untuk keluarganya tapi juga bekerja dalam mencukupi kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dengan pekerjaan petani kita bisa menikmati beragam bahan makanan untuk di konsumsi oleh seluruh keluarga yang ada di Indonesia, dan hasil pekerjaan dari buruh dan petani bisa menghasilkan devisa bagi negara terutama bagi buruh atau pekerja yang bekerja di luar negeri dan bagi petani dengan kerja kerasnya hasil pertanian bisa di ekspor ke luar negeri.

Namun dengan adanya covid 19 atau lebih di kenal dengan virus corona membuat aktivitas buruh dan petani menjadi terhambat, hal ini

² Pasal 27 UUD NKRI 1945

³ Panduan Bantuan Hukum, Di Indonesia, YLBHI, Jakarta. 2014.

di karenakan kebijakan pemerintah yang diambil sesuai prosedur kesehatan dan untuk mengurangi korban covid 19, negara dan beberapa provinsi melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga beberapa pekerja atau buruh terkena imbas dari hal tersebut, di karenakan beberapa perusahaan atau toko melakukan perumahan kepada karyawannya dengan alasan untuk efisiensi anggaran dan mencegah terjadinya penyebaran covid diantara pekerja yang lain dan menerapkan sosial distancing.

Pembatasan pergerakan masyarakat akibat covid 19 berdampak serius terhadap kehidupan pangan untuk buruh dan petani, untuk buruh yang bekerja pada perusahaan atau komoditas industri, yang bekerja untuk kehidupan mereka dan keluarganya, sandang pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok sehingga kalau pangan terhambat akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan mereka sehari-hari, begitupun petani.

Sejumlah indikator menunjukkan bahwa ekonomi pertanian seperti penyerapan tenaga kerja, hasil produksi dan pendapatan rumah tangga petani, menunjukkan kecenderungan yang bersifat negatif seiring dengan pembatasan sosial yang dilakukan oleh semua provinsi yang ada di Indonesia.⁴ lesunya konsumsi masyarakat berdampak terhadap kehidupan petani terutama sektor makanan pokok sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka dan keluarganya.

Permasalahan

Sejauhmana dampak covid 19 terhadap kesejahteraan buruh dan petani di Indoensia.

Pembahasan

a. Dampak covid 19 terhadap kesejahteraan dasar buruh dan petani

Dampak covid 19 terhadap kesejahteraan buruh dan petani, selama pandemi ini ada di dunia dan di Indonesia sangat besar pengaruhnya terutama dalam kesejahteraan kaum buruh dan kaum petani, jumlah buruh di Indonesia tercatat 2,92 juta⁵ dan 2 juta lebih buruh terdampak Covid 19 dengan 375 ribu buruh mengalami Pemutusan Hak Kerja (PHK) dan 1,4 Juta buruh di rumahkan, 3,14, ribu buruh yang disektor informal dirumahkan⁶, ada yang mendapatkan upah setengah dan tidak sedikit buruh yang tidak mendatkan upah

⁴ Widyastutik, Ekonomi Petani terguncang, Kompas,10 Juni 2020

⁵ Badan Pusat statistik, direktur statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, february 2020.

⁶ <https://titro.id/hari-buruh-nasional-2020>

sama sekali. Sedangkan untuk petani dengan jumlah 34 persen dari jumlah penduduk Indonesia adalah petani, dengan ketentuan dan rincian dari petani yang mempunyai lahan sampai kepada petani yang hanya bekerja atau buruh tani, semua terdampak covid 19 terutama dalam hal kehidupan dan kesejahteraan mereka dan keluarganya.

² Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 dalam Pasal 1 dan 2).

Kesejahteraan bagian sebagian keluarga keluarga adalah hal yang harus terpenuhi dalam meningkatkan hidup anggota keluarganya dan derajat sosialnya, nilai yang harus terpenuhi dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah kerja keras dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

² Proporsi dalam sebuah pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.⁷ Masih banyaknya rumah tangga yang ada di Indonesia yang pengeluaran pokoknya lebih besar dari pengeluaran kebutuhan lain, menandakan tingkat kesejahteraannya masih di bawah rata-rata.

b. Kesejahteraan dalam ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia

Dalam ketatanegaraan yang berlaku selama ini, negara kesejahteraan khususnya di Indonesia, secara konseptual ada dalam Pancasila sebagai dasar negara yaitu dalam sila Ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbicara tentang negara kesejahteraan tidak mungkin dilepaskan dari Pancasila karena, sebagai dasar negara, Pancasila merupakan landasan filsafat negara yang berisikan konsep, prinsip, dan nilai yang senantiasa harus dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.⁸

Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam mengatur dan melaksanakan setiap pokok-pokok pikiran dalam mengembangkan negara sesuai dengan aturan norma dan

⁷ Digilib.unila.ac.id

⁸ I.D.G. palguna. 2019. Welfare state vs globalisasi. Rajawali grafindo. Jakarta.

nilai yang terkandung dalam Pancasila kemudian diimplementasikan dalam aturan Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia juga disebutkan dalam pasal 33 dan Pasal 34, dalam Pasal 34 "ayat" 2 dijelaskan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.⁹

Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia yang ada saat ini dan berlaku untuk beberapa tahun lamanya, selama ini ada memberikan gambaran bahwa di Indonesia mempunyai dimensi dan keterkaitan, tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama dan sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakatnya, untuk itu diperlukan pengaturan menyeluruh dan komprehensif antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial.¹⁰

Hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan tegas memberikan ruang dan kesempatan kepada tenaga kerja untuk memperoleh hak bekerja dengan baik dan memperoleh penghasilan dengan baik pula. Dalam Pasal 5 UU No.13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Ketenagakerjaan atau buruh jelas sudah diatur dengan baik dalam peraturan perundang-undangan dengan jelas, sehingga karena sudah diatur dalam Undang-Undang dan negara sudah ikut dalam mengatur masalah buruh tersebut sehingga buruh dan majikan tadinya masuk dalam ranah hukum privat menjadi hukum publik.

Sedangkan untuk pemberdayaan petani diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2013, pemberdayaan petani dengan jelas diatur untuk memberikan kenyamanan dan kedaulatan bagi petani yang ada di Indonesia, dan untuk melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

⁹ Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945.

¹⁰ Tanti Kirani Utami, Peran serikat Pekerja Dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja, Jurnal wawasan Hukum, vol 28, No. 01 Februari 2013.

⁶ kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di Indonesia banyak memberikan pengaruh positif dalam ketahanan pangan yang ada di Indonesia dan bisa menghasilkan devisa dengan mengekspor hasil panen yang ada, tidak hanya makanan pokok tapi dengan adanya petani dan adanya aturan tentang petani memberikan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.

Keberadaan buruh dan petani yang sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, telah banyak memberikan kontribusi bagi Indonesia, keberadaannya walaupun selalu dianggap sebagai masyarakat kelas menengah bahkan terkadang terpinggirkan, namun sejarah dan perjuangan buruh dan petani selama Indonesia merdeka telah banyak memberikan dampak yang positif tidak hanya bagi kesejahteraan mereka tapi dengan adanya buruh produksi perusahaan dapat berjalan dengan cepat dan dengan adanya petani Indonesia pernah disebut sebagai negara di Asean yang mampu swasembada beras.

Buruh dan petani adalah bagian dari masyarakat yang perlu di sejahterakan secara sosial, politik, budaya dan ekonomi, keberadaan buruh di Indonesia sudah ada semenjak penjajahan Belanda sedangkan pergerakan buruh sudah ada sejak tahun 1897.¹¹

Dengan adanya covid 19 yang melanda dunia akhir 2019, dan Indonesia di Bulan Maret menjadikan kehidupan manusia banyak berubah, dari segi kesehatan, ekonomi pendidikan bahkan bergaul banyak mengalami perubahan secara signifikan, terutama buat buruh dan petani yang sangat merasakan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka, buruh yang biasanya bekerja dan mendapatkan gaji banyak mengalami pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan akibat perputaran ekonomi yang melambat, produksi yang kurang serta daya beli masyarakat yang berkurang, membuat beberapa perusahaan di tempa kerugian sehingga berdampak kepada pekerja mereka yaitu buruh sehingga di lakukan pengurangan pekerja bahkan pemutusan hubungan kerja(PHK). Sedangkan untuk petani dampaknya adalah daya beli masyarakat yang menurun dan tidak bisa mengirim atau mendistribusikan hasil panen ke daerah-daerah besar atau Provinsi yang jumlah penduduknya banyak akibat adanya covid 19 sehingga membuat hasil panen mereka banyak yang tidak terdistribusi seperti biasanya dan

⁸

¹¹ Randi, Buruh Vs Perusahaan (studi kasus konflik buruh/pekerja Driver Go jek dengan PT gojek Indonesia, Jurnal Social Work, Vol. 7, No.2 februari 2018.

mengalami kerugian dari segi kesejahteraan mereka bahkan banyak yang mengalami kerugian akibat hasil yang tidak bisa di jual sedangkan untuk menghasilkan hasil panen yang melimpah dan bagus di butuhkan tenaga dan pupuk untuk mereka pakai di lahan mereka.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar ke empat di dunia dan negara yang agraris subur dan memiliki ribuan pulau untuk kemudian wajib di sejahterakan dan di jaga kelestariannya, untuk itu suatu bangsa dalam menjalankan pembangunannya tenaga kerja atau buruh dan petani sangat mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan yang ada dalam Undang-Undang adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera dan dapat meningkatkan kualitas seluruh masyarakat, tidak hanya dari segi pendidikan dan ekonomi tapi juga kemampuan bekerja dan bertani sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan mampu menjadi bangsa yang bisa menghasilkan sendiri kebutuhan pokoknya.

Dengan sejahteranya buruh dan petani memberikan peluang negara untuk menjadi bangsa yang kuat dan mampu bersaing dengan bangsa lain tidka hanya di Asean tapi juga jadi bangsa yang kuat di dunia, tidak hanya jumlah penduduknya yang terus bertambah dan luas laut, pulau dan hutannya yang banyak tapi juga kemampuan pekerja dan petani harus lebih di tingkatkan dalam mewujudkan bagsa yang berdaulat.

Namun hal ini belum sepenuhnya dapat di wujudkan, dengan masih minimnya upah buruh yang ada, untuk di wilayah Asean, Indonesia jauh di bawah peringkat negara-negara Asean lainnya dalam menmberikan upah kepada pekerjanya.¹² Indonesia hanya mampu memberikan upah kepada pekerja nya 3.6 juta perbulan, jauh dibawah Singapura dan BRunei darussalam yang mampu menggaji pekerjanya 35 juta perbulan, sedangkan Malaysia mampu menggaji pekerjanya 11, juta perbulan.

Upah buruh 3,6 juta yang berlaku selama ini, itu berlaku untuk daerah Jakarta, sedangkan untuk daerah lainnya sangat minim, salah satu contohnya adalah di Provinsi Aceh, daerah yang berbatasan dengan Malaysia ini hanya mampu menggaji pekerjanya 1,9 juta perbulan. Dalam hal pemberian upah yang ada selama ini, minimum yang diterima oleh buruh di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh masih sangat rendah yaitu 1,9 juta. Dimana dalam Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dimiliki oleh KSPI mencapai 2,5 juta. Namun, jumlah nominal tersebut tidak di sepakati dalam sidang Dewan

¹² <https://www.kompas.com>

Pengupahan. Hal tersebut mengakibatkan upah minimal yang di dapatkan buruh di kota Banda Aceh tidak sesuai harapan.¹³

Upah merupakan komponen penting yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja sebagai timbal balik dari produktivitas kerja yang dihasilkan. Pemberian upah ini harus berstandar layak agar para pekerja dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Namun di sisi lain, Pemerintah berkepentingan juga untuk menetapkan kebijakan pengupahan. Di satu pihak untuk tetap dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya beli masyarakat.¹⁴

Permasalahan buruh dan petani yang ada di Indonesia selama ini banyak terkait dengan hal yang selalu berulang dari tahun ke tahun dari setiap orde pemerintahan yaitu: terbatasnya peluang kerja, masih tingginya angka pengangguran di Indonesia, rendahnya kemampuan dan keterampilan buruh dan petani, kerjaan yang banyak namun upah murah dan jaminan sosial yang seadanya. kemudian juga perlakuan yang merugikan bagi para pekerja pemutusan kerja dengan sepihak, dan beberapa bentuk tindak pidana seperti penganiayaan, tindak asusila, penghinaan, intimidasi sampai pelecehan seksual. Dengan hak tersebut diatas menjadikan banyak warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja di luar negeri dan ini pun menyisakan masalah dengan kurangnya perlindungan dan pengawasan dari negara terhadap para tenaga kerja Indonesia tersebut.

Dengan adanya dampak covid 19 yang hampir melanda semua negara di dunia, sangat berdampak terhadap kesejahteraan buruh dan petani yang ada di Indonesia selama ini, sebelum adanya covid 19, belum terpenuhi secara maksimal bahkan terkadang buruh dan petani dianggap masyarakat kelas dua sehingga keberadaannya diibaratkan dengan pekerjaan kasar dan kurang mempunyai keahlian, akibatnya membuat upah yang di berikan oleh para pengusaha itu seadanya bahkan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, setelah terjadinya pandemi covid 19 membuat kehidupan buruh dan petani semakin jauh dari kesejahteraan bahkan banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja, sedangkan untuk petani banyak yang tidak bisa menjual hasil panen mereka.

Sebelum pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia, pekerja atau buruh di Indonesia, banyak yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI/TKW), namun dengan pembatasan sosial dan tidak bisa melakukan perjalanan keluar negeri, bahkan himbauan pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tinggal dirumah demi menjaga kesehatan dan mengurangi penyebaran covid 19 tidak

¹³ Yusnil, Peran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh Dalam Membela Kaum buruh Di kota Banda Aceh, jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol 2, No, 4 November 2017

¹⁴ Arief Nurrahman sejati dkk, Peran buruh dalam kesejahteraan sosial perusahaan PT senang Kharisma Textile, Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 30, No.1 Tahun 2015.

meluas, menjadikan buruh dan petani betul-betul hanya tinggal dirumah tanpa bekerja, dapat dipahami dari segi kesahatan, namun bisa di bayangkan bagi seorang kepala rumah tangga yang menanggung istri dan anak, belum lagi pembayaran sekolah dan kebutuhan pangan lainnya, tentunya akan sangat membahayakan bagi mereka, sedangkan kehidupan dan makan harus terus berjalan setiap hari.

Dampak pandemi covid 19 yang melanda selama ini berdampak beragam bagi setiap manusia, untuk pelajar dan mahasiswa tentunya membutuhkan paket data untuk mereka bisa kuliah dan belajar, sedangkan bagi pekerja kantoran juga sangat berdampak terhadap aktivitas mereka, bagi pengusaha yang memproduksi bahan makanan atau pakaian atau aktivitas lainnya akan mengalami kerugian dengan adanya penutupan sektor ekonomi selama pandemi covid 19 tidak menurun, sedangkan yang paling banyak terkena dampak adalah bagi pekerja/buruh dan petani yang hanya mengandalkan gaji, belum lagi ada beberapa pekerja yang di bayar atau upahnya hanya perhari, sehingga mereka yang tidak masuk bekerja tidak mendapatkan gaji untuk mereka makan bersama dengan keluarga mereka.

Dalam menghadapi akibat covid 19, situasi yang tidak menentu terhadap perekonomian dan kehidupan sosial, kehidupan manusia banyak mengalami perubahan, namun hal ini tentunya bukan hanya berpengaruh terhadap kesejahteraan tapi juga kesehatan, hal yang perlu dilakukan tidak hanya berharap dari bantuan pemerintah dan menyalahkan keadaan, buruh bisa melakukan hal yaitu berwirausaha.

Berdasarkan kajian Bank Dunia (world Bank) memberikan indikasi bahwa idealnya jumlah wirausaha di suatu negara minimal 2 % dari jumlah penduduk yang ada saat ini, jadi dari jumlah buruh yang ada yaitu kurang lebih dua juta dari bisa dua persen atau 200 ribu bisa melakukan perubahan sehingga tidak terlalu berdampak dalam kehidupan terutama melakukan berbagai segala aktivitas yang bisa mereka lakukan selama ini. Jumlah wirausaha di beberapa negara di asean, seperti Malaysia, Singapur dan Thailand serta Filipina sangat meningkat setelah terkena dampak covid 19.¹⁵

Buruh yang ada selama ini telah bekerja pada berbagai sektor, mulai dari sektor rumah tangga, sektor produksi makanan, produksi pakaian, industri tekstil dan pabrik-pabrik dalam dan luar negeri, kemampuan dan keahlian harus dibarengi dengan kemampuan berwirausaha sehingga bisa menjadi

¹⁵ R. Muhammad Mihradi dkk, *Dinamika Problematika sosial, Perlindungan Buruh Migran Indonesia Pasca reformasi dan Relevansinya Dengan tantangan wirausaha di era masyarakat ekonomi asean*, Kawistara, Vol 7 No.2, Agustus 2017

pekerja yang kreatif dan dapat menghasilkan suatu karya yang bisa membuat mereka sejahtera bersama dengan keluarganya.

Sedangkan untuk petani yang menjadi tumpuan masyarakat dalam subsidi makanan serta kebutuhan pokok yang di konsumsi masyarakat Indonesia dan menjadi tumpuan pemerintah dalam mencukupi kebutuhan pangan selama pandemi covid 19, yang mengalami masalah dalam mengimpor makanan dari luar.

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam. sektor pertanian dewasa ini juga menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan nasional terutama dalam menyediakan pangan untuk menunjukkan ketahanan pangan nasional. Namun pergeseran tenaga kerja yang disektor pertanian terus menurun selama masa pandemi covid 19.

Penutup

Dampak covid 19 terhadap kesejahteraan buruh dan petani di Indonesia, sangat merugikan bukan saja dari segi ekonomi namun juga dari segi psikis bagi mereka dan keluarga yang mengalami kekurangan dari segi pendapatan dan kehidupan sosial, banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan kerja, terpuruknya produksi dan melemahnya ekonomi, sangat dirasakan oleh buruh dan petani yang ada di indonesia.

Jumlah buruh kurang lebih 2 juta di Indonesia telah dirumahkan 1,4 juta, tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka dan keluarganya, perhatian dan bantuan pemerintah tentunya bukan merupakan suatu solusi sehingga diharapkan buruh dan petani dapat memanfaatkan kemampuan dan skil yang dimiliki untuk bisa melakukan aktivitas yang bisa menghasilkan pendapatan dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi mereka.

Daftar Pustaka

¹⁰ Arief Nurrahman sejati dkk, Peran buruh dalam kesejahteraan sosial perusahaan PT senang Kharisma Textile, Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 30, No.1 Tahun 2015.

⁹ R. Muhammad Mihradi dkk, Dinamika Problematika sosial, Perlindungan Buruh Migran Indonesia Pasca reformasi dan Relevansinya Dengan tantangan

wirausaha di era masyarakat ekonomi asean, Kawistara, Vol 7 No.2, Agustus 2017

Munir fuadi, teori negara hukum moderen, Reflika utama, Bandung 2011

Tanti Kirani Utami, Peran serikat Pekerja Dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja, Jurnal wawasan Hukum, vol 28, No. 01 Februari 2013¹ Pasal 27 UUD NKRI 1945

Panduan Bantuan Hukum, Di Indonesia, YLBHI, Jakarta. 2014.

⁸ Randi, Buruh Vs Perusahaan (studi kasus konflik buruh/pekerja Driver Go jek dengan PT gojek Indonesia, Jurnal Social Work, Vol. 7, No.2 februari 2018
Widyastutik, Ekonomi Petani terguncang, Kompas,10 Juni 2020

Badan Pusat statistik, direktur statistik kependudukan dan ketenagakerjaan, februari 2020.

¹ Yusnil, Peran Konferederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh Dalam Membela Kaum buruh Di kota Banda Aceh, jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol 2, No, 4 November 2017

<https://titro.id/hari-buruh-nasional-2020>

<https://www.kompas.com>

BIODATA PENULIS

Dr. Asmah,SH.MH, lahir di Pinrang 18 November 1980 merupakan dosen tetap yayasan Universitas Sawerigading Makassar dengan pangkat Lektor kepala/gol.III.D, memulai karir sebagai Dosen tahun 2005 sampai sekarang dan dipercaya jadi Dekan fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar Sampai sekarang.

DAMPAK COVID 19 TERHADAP KESEJAHTERAAN HIDUP BURUH DAN PETANI

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etd.unsyiah.ac.id Internet Source	2%
2	eprint.stieww.ac.id Internet Source	2%
3	docobook.com Internet Source	2%
4	www.scribd.com Internet Source	2%
5	kelaspkn.blogspot.com Internet Source	2%
6	www.jogloabang.com Internet Source	2%
7	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to University of Melbourne Student Paper	1%
9	doaj.org Internet Source	1%

10

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1 %

11

rahmatullah-sahil.blogspot.com

Internet Source

1 %

12

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 27 words

Exclude bibliography On